

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. ,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama ,2002.

Miftah thohah, *Birokrasi & Politik di Indonesia* ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hayami Yujiro dan Masao Kikuchi, *Dilemma Ekonomi Desa Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia* . Jogjakarta: YOI,1987, 11.

Hanif Nurholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Soetardjo Kartohadikoesoemo , *Desa*, Jakarta:Balai Pustaka,1984, 183

Chen, Xiaoting Xiaoyu Xian Xun, Min Yeh Tsai, Peter G. Wolynes, Gabriela da Rosa, Leandro Grille, Victoria Calzada, Katya Ahmad, et al. "FUNGSI BPD TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DUSUN RAJA." *Nucleic Acids Research* 2018.

Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 323-329.

Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan antara DPD dan DPR dalam system parlemen Bikameral* ,Bengkulu:Vanda,2016.

Irfan Fachruddin, *pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*, Bandung P.T. alumni Bnadung,2004.

Hayami Yujiro dan Masao Kikuchi, *Dilemma Ekonomi Desa Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia* Jogjakarta:YOI,1987.

Moch Solekhan, *Penyelenggaran Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang, Setara Press 2014.

Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, *Desa kuat Indonesia hebat* ,Yogyakarta: pustaka yustisia, 2015.

Imam Al-Mawardi, *ahkam sulthaniyah system pemerintahan khilafah islam* ,jakarta: qisthi press,2015.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Jakarta:Balai Pustaka,1984.

H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat & Utuh*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

## JURNAL

- Abd Kadir, Muhammad Arifin, Kamaluddin, and Arie Purnomo. "Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Distrik Maladum Mes Kota Sorong." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (March 15, 2022): 59–68. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i1.1641>.
- Bender, Daniel. "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.
- JASMINE, KHANZA. "PERAN BPD DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI MASYARAKAT." *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 9–29.
- Mauliddiyah, Nurul L. *Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Inspektorat Provinsi Aceh*, 2021.
- Rahman, Khairul. "Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa." *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 2, no. 1 (2016): 189–99.
- Ramon, Citia. "Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Pekon Sukanegara Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung," 2015.
- Zainudin, Abang, and Mangut Riadi. "Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan." *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 21, no. 2 (2023): 360–74. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i2.814>.
- Hermawansyah, A., Ramli, R., Azmi, I. F., & Muhammad, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Good Governance*, 101-116.
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606-624.
- Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Perspektif*, 6(2), 41-52.
- Suriadi, S., & Amir, M. (2024). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Buton Tengah. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 15(1), 109-117.
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158-170
- Faysal, A., & Pradana, G. W. (2023). PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 (STUDI KASUS DI DESA DOMAS, KECAMATAN MENGANTI, KABUPATEN GRESIK): bahasa indonesia. *Publika*, 2215-2230.
- Sunarti, N. (2018). Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa

- (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 46-55.
- Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M. C. B. (2020). Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 11(1), 23-27.
- La Suhu, B., Ibrahim, A. H. H., Kaunar, A., & Umar, B. (2022). FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019 DI DESA DAMA KECAMATAN LOLODA KEPULAUAN: Dosen Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia. *JOURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO*, 3(2), 18-23.
- Adha, A. H., & Ernawati, E. (2016). *Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Riau University).

## SKRIPSI

- Kharisma, M. A., & Masidin, M. (2021). TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 STUDI KASUS DESA BOJONG BARU KABUPATEN BOGOR. *National Journal of Law*, 5(2), 497-541.
- Haryani, D. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Perspektif*, 5(1).
- USMANY, B., Dengo, S., & Londa, V. (2016). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(41).
- Langoy, F. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 160583.

## Undang-Undang :

Perbup Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.